



**EVALUASI KEBERHASILAN TRANSMIGRASI JAWA TIMUR DI
UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI TANJUNG BUKA SP.3
KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**EVALUATION OF SUCCESS OF TRANSMIGRATION EAST JAVA IN
UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRAN TANJUNG BUKA SP.3
BULUNGAN DISTRICT, NORTH KALIMANTAN PROVINCE**

Slamet Hari Sutanto, Nakkok Aruan, dan M. Amir HT

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur
Jl. Gayung Kebonsari No. 56, Surabaya, 60235
E-mail: slametharisutanto@gmail.com

Naskah diterima: 14 November 2018; revisi terakhir: 12 Juli 2019; disetujui: 22 Juli 2019

How to Cite: Sutanto, Slamet H., Aruan, Nakkok., dan Amir HT, M. (2019). Evaluasi Keberhasilan Transmigrasi Jawa Timur di Unit Permukiman Transmigrasi Tanjung Buka SP.3 Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Borneo Administrator*, 15 (2), 199-220. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i2.399>

Abstract

The purpose of this research is to find out how high the level of success has been achieved, as well as the problems faced by transmigrants. The method used was descriptive qualitative. Thus, the data were obtained from in-depth interviews and triangulation data through Focus Group Discussions and direct observation by withdrawing information from 50 transmigrants chosen purposively. The results of the evaluation research showed the average score based on 9 (nine) measurements of welfare level indicators. It showed that the level of welfare of transmigrants in UPT Tanjung Buka SP.3 was categorized quite well., However, based on data obtained from in-depth interview and observations in the field, there were still some crucial problems in the form of constraints and obstacles which include aspects of land conditions, technical aspects of farming management, road and bridge infrastructure, economy, and social.

Keywords: *Transmigration, People's welfare, Bulungan regency*

Abstrak

Tujuan dari penelitian evaluasi keberhasilan penempatan transmigran asal Jawa Timur ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan yang telah dicapai, serta permasalahan-permasalahan apa saja yang masih dihadapi oleh transmigran. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), serta dilakukan triangulasi melalui



Diskusi Kelompok Terfokus dengan menggali informasi dari 50 orang transmigran yang dipilih secara purposive, serta melalui observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Hasil penelitian evaluasi menunjukkan nilai rata-rata berdasarkan pengukuran 9 (sembilan) indikator tingkat kesejahteraan menunjukkan tingkat kesejahteraan transmigran UPT Tanjung Buka SP.3 dapat dikategorikan cukup baik, namun berdasarkan analisis terhadap jawaban kuesioner, pendalaman melalui wawancara mendalam, serta observasi di lapangan, masih terdapat beberapa permasalahan yang cukup krusial berupa kendala dan hambatan yang meliputi aspek kondisi lahan, aspek teknis pengelolaan usaha tani, infrastruktur jalan dan jembatan, ekonomi, dan sosial.

Kata Kunci: Transmigrasi, Kesejahteraan rakyat, Kabupaten Bulungan

A. PENDAHULUAN

Pengentasan kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur tahun 2014-2019 merupakan salah satu fokus utama pembangunan, sebab jumlah penduduk miskin masih mencapai angka 4,86 juta jiwa atau sekitar 13,5% dari total jumlah penduduk. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,24 juta jiwa atau sekitar 66,67% berada di daerah perdesaan. Faktor utama penyebabnya adalah jumlah penduduk yang terus meningkat sehingga lahan pertanian dalam arti luas termasuk lahan perkebunan dan perikanan/tambak mengalami penyusutan karena alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman/perkotaan. Produktivitas lahan pertanian yang menurun menyebabkan kesejahteraan petani daerah perdesaan mengalami penurunan, sehingga menghambat upaya-upaya pengentasan kemiskinan.

Menurut hasil Sensus Pertanian tahun 2013 ([Oktavia dkk, 2016:73](#)), kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Jawa Timur juga terus menurun selama kurun waktu lima tahun (2009-2013) dari 16,34% menjadi 14,91%. Secara simultan terjadi pelemahan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dari 42,93% menjadi 37,41%. Sehingga tanpa adanya intervensi dalam bentuk program untuk mengatasi masalah kependudukan dan ketenagakerjaan di daerah perdesaan, maka selain akan mempersulit upaya pengentasan kemiskinan juga berpotensi menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan di daerah perdesaan.

Salah satu intervensi program yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk, kemiskinan dan pengangguran di daerah pedesaan tersebut adalah melalui pelaksanaan program transmigrasi. Dengan jumlah penduduk di atas 37 juta jiwa pada tahun 2012 dan tingkat kepadatan mencapai 803 jiwa/km² serta 21,19 % dari jumlah penduduk mengandalkan sumber mata pencaharian dari pengelolaan potensi sumberdaya alam di sektor pertanian maka kondisi kependudukan di Jawa Timur semakin menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara penduduk yang membutuhkan potensi sumberdaya ruang sebagai sumber mata pencaharian dengan potensi sumberdaya ruang yang tersedia.

Melalui program transmigrasi, penduduk yang kurang dan atau tidak memiliki sumberdaya ruang sebagai mata pencaharian dipindahkan ke daerah lain yang memiliki potensi sumberdaya ruang yang besar, namun tidak dan atau kurang memiliki sumberdaya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mengelolanya guna dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan penduduknya ([Prayogo, 2003:16](#)). Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, pemindahan penduduk melalui program transmigrasi tersebut dilakukan secara sukarela dan selektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan



menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dengan demikian, transmigrasi diharapkan tidak sekedar pemindahan penduduk, tetapi juga sebagai upaya untuk pengembangan wilayah, sehingga peran pemerintah daerah sangat penting ([Yuminarti, 2017:16](#)).

Sejak tahun 2011 pelaksanaan program transmigrasi menggunakan paradigma baru dalam skema kerjasama antar daerah, yaitu ada daerah yang memiliki kepentingan untuk memindahkan penduduknya yang tidak memiliki sumber daya alam lahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebaliknya daerah yang memiliki kepentingan untuk memperoleh pindahan penduduk untuk mengelola sumber daya alam lahan yang melimpah tersebut guna pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Untuk menemukan kepentingan yang berbeda sehingga saling melengkapi dan saling menguntungkan, maka kedua tipologi daerah tersebut perlu melakukan kerjasama yang dalam hal ini melalui program transmigrasi ([Junaidi dkk, 2012:523](#)).

Dalam perspektif [Keban \(2007:3\)](#), melalui kerjasama antar daerah ini pihak-pihak yang bekerjasama dapat memperjuangkan kepentingannya, sebab bila secara sendiri memperjuangkan kepentingannya sulit untuk berhasil. Bagi daerah yang memiliki jumlah penduduk besar namun tidak memiliki sumber daya alam lahan untuk diolah, melalui program transmigrasi dapat memperoleh sumber daya alam lahan, sebaliknya, bagi daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah namun kekurangan tenaga kerja (sumber daya manusia) untuk mengelolanya, melalui program transmigrasi dapat memenuhinya ([Najiyati S, 2006:24](#)).

Menurut data BPS (2014) luas wilayah daratan Jawa Timur adalah 42.541 km² dengan jumlah penduduk 38,85 juta jiwa, sehingga kepadatan penduduk Jawa Timur mencapai 913 jiwa/km². Sedangkan Kalimantan Utara yang luas wilayah daratannya 70.109 km² dengan jumlah penduduk 628.331 jiwa, kepadatan penduduknya hanya 9 jiwa/km². Data ini menunjukkan, dari sisi kepadatan penduduk antara Jawa Timur dan Kalimantan Utara adalah 1 berbanding 101. Selanjutnya data hasil Sensus Pertanian Tahun 2013 (BPS, 2014) menunjukkan dari luas daratan sebesar 4.254.100 ha, luas sawah pertanian mencapai 1.102.863 ha atau sekitar 25,92%. Jika diasumsikan luas minimal kawasan hutan sebesar 35%, maka sekitar 39,08% luas daratan Jawa Timur saat ini merupakan kawasan perkebunan, perikanan/tambak, peternakan, tanaman hortikultura, serta kawasan permukiman/perkotaan. Namun, dengan melihat data dari 4.931.502 rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan yang sekitar 76,16% adalah rumah tangga petani gurem (rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,50 ha), maka potensi sumber daya alam lahan –non kawasan hutan –yang tersedia sudah sangat terbatas.

Sebaliknya Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki luas wilayah daratan 70.109 km² atau 7.010.900 ha, luas sawah pertanian baru mencapai 21.762 ha atau hanya sekitar 0,31%. Dengan asumsi luas kawasan hutan minimal sekitar 40%, atau 2.804.360 ha, maka masih tersisa seluas 4.184.778 ha sumber daya alam lahan yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan menjadi kawasan perkebunan, perikanan/tambak, peternakan, tanaman hortikultura, serta kawasan permukiman atau perkotaan. Dengan melihat data jumlah penduduk Kalimantan Utara yang berjumlah 628.331 jiwa, baru sebanyak 39.363 rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan atau hanya sekitar 0,80% dari jumlah rumah tangga yang sama di Jawa Timur. Itu pun hanya sekitar 16,11% rumah tangga petani gurem, sisanya sekitar 83,89% adalah rumah tangga bukan petani gurem (rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan 0,50 ha atau lebih). Artinya, untuk mengelola sumber daya alam lahan guna dikembangkan sebagai kawasan perkebunan,



perikanan/tambak, peternakan, dan tanaman hortikultura, masih membutuhkan tenaga kerja atau sumber daya manusia berbasis pertanian dalam jumlah yang besar.

Baik Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sesungguhnya berkepentingan untuk mengimplementasikan program transmigrasi. Meski sebelum era otonomi daerah sudah berlangsung program transmigrasi dari Provinsi Jawa Timur ke Provinsi Kalimantan Utara (yang sebelum tahun 2012 masih merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur), namun paradigmanya masih sentralistik yaitu program transmigrasi yang diselenggarakan diinisiasi, diprogramkan, diselenggarakan, diawasi, dan dibina oleh Pemerintah Pusat, meski sedikit banyak didasari atas kebutuhan dan atau kepentingan kedua daerah, atau setidaknya telah memberi keuntungan kepada kedua daerah ([Rustiadi, 2011:4](#)).

Penempatan transmigran asal Jawa Timur di UPT Tanjung Buka SP.3 sebanyak 50 KK sejak bulan November 2015 sampai dengan bulan November 2016 merupakan implementasi program transmigrasi dengan paradigma baru melalui format kerjasama antar daerah. Melalui format kerjasama antar daerah paradigma baru program transmigrasi, meski inisiasi penyelenggaraannya tetap berada di tangan Pemerintah (Pusat) namun proses perpindahan dan penempatan transmigran dilakukan melalui mekanisme kerjasama antar daerah, yang dalam hal ini adalah antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan.

Melalui format kerjasama antar daerah sebagai paradigma baru program transmigrasi, meski inisiasi penyelenggaraannya tetap berada di tangan Pemerintah (Pusat) namun proses perpindahan dan penempatan transmigran dilakukan melalui mekanisme kerjasama antar daerah, yang dalam hal ini adalah antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Proses penempatan transmigran asal Jawa Timur ini diawali dengan penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Bulungan pada tanggal 8 Desember 2011. Dalam kesepakatan tersebut secara multiyears selama tiga tahun, Provinsi Jawa Timur akan mengirimkan 600 KK transmigran yang akan direalisasikan tahun 2012-2014.

Dalam proses penyusunan dan penandatanganan kesepakatan bersama tersebut, mediator dan fasilitator berada pada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Pada tanggal 13 Januari 2012 di Jakarta, ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal P2KTrans Kemenakertrans dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan, yang tujuannya merinci lebih jelas hak dan kewajiban para pihak terutama dalam hal ini adalah sharing budget guna memperlancar pelaksanaan program transmigrasi. Dengan adanya sharing budget ini, maka pihak-pihak yang bekerjasama memiliki kepentingan serta tanggungjawab bersama untuk menyukseskan program tersebut.

Selanjutnya sesuai Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2013, Pemerintah Provinsi berkewajiban melakukan pembinaan pasca penempatan yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, pengembangan kelembagaan pemerintahan, dan lingkungan permukiman. Selanjutnya pada ayat (4) dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah penempatan transmigran, pembinaan diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat, dan pada saat penyerahan tersebut tidak lagi terdapat permasalahan-permasalahan yang berarti baik terkait dengan warga transmigran dan



permukimannya maupun dengan warga masyarakat di lingkungan sekitarnya. Terkait dengan hal tersebut, pada Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2013 menyebutkan Gubernur melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan sesuai dengan kewenangannya, dan pada ayat (2) menyebutkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi. Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat keberhasilan program.

Menurut [Suharsimi Arikunto \(2009:297\)](#) evaluasi program adalah kegiatan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan. Dalam konteks ini, evaluasi penempatan transmigran asal Jawa Timur di UPT Tanjung Buka SP.3 Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan yang telah dicapai, serta permasalahan-permasalahan apa saja yang masih dihadapi oleh transmigran. Sehingga dengan sisa waktu masa pembinaan (5 tahun) yang tersisa, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dapat melakukan upaya-upaya konkrit maupun langkah-langkah antisipatif agar pada penyerahannya kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara tidak terdapat permasalahan-permasalahan yang berarti. Sehingga pertanyaan penelitian evaluasi ini dirumuskan untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan program transmigrasi Jawa Timur di UPT Tanjung Buka SP.3 Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Permasalahan (kendala/hambatan) apa saja yang dihadapi transmigran di UPT Tanjung Buka SP.3 untuk meningkatkan kesejahteraannya, dan yang ketiga adalah upaya-upaya konkrit dan langkah-langkah antisipatif apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi transmigran di UPT Tanjung Buka SP. 3 Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kombinasi atau *mix methods* yaitu suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif. Metode *Mixed Method* dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap permasalahan penelitian daripada digunakan secara terpisah ([Creswell, 2007:240](#)).

Pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian evaluatif yang dilaksanakan pada waktu program masih berlangsung (*on-going evaluation*) yaitu untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak dan hasil dari program yang sedang berjalan atau berlangsung. Analisis yang terfokus dan terbatas pada kategori tertentu berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fokus yang menjadi sasaran evaluasi ini ([Bungin, 2003](#)) yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan program transmigrasi serta mengidentifikasi kendala/hambatan yang dihadapi transmigran di UPT Tanjung Buka SP.3 untuk meningkatkan kesejahteraannya, serta untuk merumuskan upaya-upaya konkrit dan langkah-langkah antisipatif apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dalam konteks ini, indikator penelitian dianalisis dengan menggunakan pendekatan persepsi berdasarkan pemahaman serta apa yang dirasakan responden, atau lebih dikenal sebagai analisis statistik deskriptif.

Secara umum data yang diperoleh dalam evaluasi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner model semi tertutup-terbuka yang dilakukan terhadap 50 orang yang dipilih secara acak dengan cara diundi dari 530 transmigran asal Jawa Timur yang ada di SP.3, langkah tersebut dilakukan karena semua transmigran dianggap homogen sehingga masing-masing memperoleh peluang yang sama



untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasi ([Sugiyono, 2010:57](#)). Kemudian untuk menggali informasi lebih dalam dilakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dilakukan triangulasi melalui Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion*). Pengumpulan data primer juga dilakukan melalui observasi atau pengamatan langsung di lapangan untuk memperkuat hasil penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh tidak langsung dari obyek atau lokasi evaluasi, seperti data kepustakaan, laporan-laporan, dokumen-dokumen, data statistik, foto-foto, dan sebagainya yang diperoleh dari lembaga yang terkait dengan program transmigrasi. Data sekunder diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan, Kepala UPT Tanjung Buka SP.3, perpustakaan dan dokumen-dokumen terkait yang relevan.

C. KERANGKA TEORI

Pengertian Transmigrasi

Transmigrasi secara umum diartikan sebagai perpindahan penduduk yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai akibat tumbuhnya kekhawatiran akan kemunduran kemakmuran rakyat yang disebabkan tekanan penduduk yang semakin terasa ([Keyfitz dan Nitisastro, 1955:4](#)). Sedangkan menurut [Heeren \(1979:6\)](#), transmigrasi adalah perpindahan dalam hal ini memindahkan orang dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya dalam batas negara dalam rangka kebijaksanaan nasional untuk tercapainya penyebaran penduduk yang lebih seimbang. Dari pengertian di atas, menurut [Sofyan \(2013:1170\)](#), apabila pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak dapat dikendalikan maka pemerataan kemakmuran yang ada dan seharusnya ditujukan untuk masyarakat secara menyeluruh tidak akan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat pada umumnya.

Transmigrasi menurut Martono (dalam [Swasono, 1986:6](#)), transmigrasi dalam konteks Indonesia adalah suatu sistem pembangunan terpadu, artinya merangkul seperangkat prinsip dan metode untuk penyelenggaraan permukiman dan kehidupan baru bagi suatu kelompok masyarakat, sebagai perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dalam rangka pembentukan masyarakat baru untuk membantu pembangunan daerah, baik daerah yang ditinggalkan maupun yang didatangi dalam rangka pembangunan nasional. Konsep mengenai pembangunan terpadu yang dikemukakan oleh Martono (dalam [Swasono, 1986:6](#)), mengacu kepada pembangunan daerah asal (daerah yang ditinggalkan) dan daerah penerima (daerah yang didatangi).

Secara umum pelaksanaan program transmigrasi telah menunjukkan keberhasilan dalam berbagai aspek pembangunan. Namun, di balik keberhasilan tersebut terdapat berbagai permasalahan (kendala/tantangan). [Siswono Yudohusodo \(1998:8\)](#) menyebutkan beberapa permasalahan, yaitu: (a) Sistem pemberdayaan dan pembinaan masyarakat transmigrasi dilaksanakan dengan pendekatan sentralistik, yang mengakibatkan budaya lokal nyaris tidak berkembang, sementara budaya pendatang lebih mendominasi; (b) Proses perencanaan kawasan permukiman transmigrasi kurang dikomunikasikan dengan masyarakat sekitar; (c) Adanya pembangunan permukiman transmigrasi yang eksklusif sehingga dirasakan kurang adanya keterkaitan secara fungsional dengan lingkungan sekitarnya; dan (d) Adanya permukiman transmigrasi yang tidak layak huni, layak usaha, dan layak berkembang.

Studi yang dilakukan [Rohani Budi Prihatin \(2012:59\)](#) menyatakan bahwa walaupun telah menunjukkan adanya keberhasilan program, namun berbagai permasalahan yang



dihadapi dalam pengembangan unit lokasi transmigrasi masih saja terjadi, di antaranya aksesibilitas ke lokasi transmigrasi yang rendah, produksi para transmigran yang tidak dapat dipasarkan, lahan transmigrasi yang marginal (tidak subur), sarana dan prasarana sosial-ekonomi kurang mendukung pengembangan usaha transmigran, serta adanya masalah sengketa kepemilikan lahan. Hal ini menyebabkan kegiatan ekonomi di lokasi transmigrasi tidak berkembang, pendapatan para transmigran tetap rendah, desa transmigrasi tidak memiliki daya tarik bagi para pemilik modal untuk mengembangkan usahanya, dan kebutuhan masyarakat masih tergantung dari luar permukiman transmigrasi.

Terkait dengan kemandirian para transmigran di lokasi yang baru, penelitian yang dilakukan [Widaryanto dan Nurmawati \(2011\)](#) menemukan beberapa masalah pokok yang menyebabkan kemandirian transmigran di beberapa unit permukiman transmigrasi lambat terwujud. Kendala tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan dalam kendala fisik dan prasarana, kendala manajemen, rendahnya modal sosial, dan aplikasi teknologi yang kurang tepat. Permasalahan utama yang sering dijumpai antara lain keterbatasan sarana dan prasarana penghidupan dan kehidupan, produktivitas lahan rendah, keterlambatan penerapan teknologi dan budidaya pertanian, sulitnya memperoleh modal usaha tani sampai tidak adanya pendamping atau pembina di unit permukiman transmigrasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di sembilan provinsi pada tahun 2005 ([Prihatin, 2012:60](#)), menemukan ada indikasi bahwa transmigran belum mampu mengolah sumber daya alam yang tersedia secara optimal. Hal lain adalah keterbatasan lahan serta kesesuaian lahan pertanian juga sangat mempengaruhi keberhasilan para transmigran. Pada umumnya lahan yang tersedia di permukiman transmigrasi cukup memadai, namun faktor kesesuaian lahan untuk pertanian dan perkebunan tidak selalu memenuhi standar. Dalam beberapa kasus misalnya, ditemukan adanya kondisi lahan yang tingkat keasamannya cukup tinggi. Selain itu, pemasaran hasil pertanian terkadang menjadi salah satu penyebab terpuruknya ekonomi transmigran.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah persoalan lahan. Penyediaan dan penyediaan lahan merupakan salah satu tahapan paling penting dalam program transmigrasi, terutama untuk menempatkan para transmigran di lokasi unit permukiman transmigrasi. Pesatnya perkembangan pembangunan di segala bidang, menyebabkan pemerintah saat ini menghadapi kesulitan untuk mendapatkan lahan. Di tengah ketersediaan lahan yang semakin terbatas, persyaratan status tanah lokasi harus *clear and clean* (jelas status hukumnya dan bebas dari konflik pertanahan) masih menemui kendala dalam pemrosesannya. Selain itu, persyaratan 4L (layak huni, layak usaha, layak berkembang, dan layak lingkungan) merupakan persyaratan lahan yang kerap tidak terpenuhi ([Delam, 2011: 55–65](#)).

Pengertian, Tujuan, Dan Jenis Evaluasi Program

Menurut [Arikunto \(2009:5\)](#), evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Evaluasi dimaksud dilakukan dengan cara sistematis dengan mengumpulkan, menganalisis, dan memakai data dan atau informasi untuk melihat tingkat keberhasilan program. Dalam evaluasi keberhasilan transmigrasi Jawa Timur di UPT Tanjung Buka SP.3 Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara ini, pengumpulan dan analisis data dan atau informasi tingkat keberhasilan dilakukan pada waktu program masih berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun (*on-going evaluation*).

Tujuan evaluasi program sebagaimana dikemukakan oleh [Arikunto \(2009:5\)](#) adalah untuk menilai dan melihat secara sistematis pencapaian target program yang sudah



dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan standar yang ditentukan. Dalam evaluasi keberhasilan transmigrasi Jawa Timur di UPT Tanjung Buka SP.3 Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara ini, akan dinilai dan dilihat sudah sampai sejauh mana tingkat keberhasilan Transmigrasi yang sudah dicapai, yang dalam hal ini diukur dari tingkat kesejahteraan transmigran terutama dibandingkan dengan kondisi transmigran sebelumnya di daerah asal (Jawa Timur).

Selanjutnya menurut [Wirawan \(2011:107-110\)](#), evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi: (a) evaluasi proses (*process evaluation*), yakni meneliti, menilai dan menentukan apakah intervensi atau layanan program telah dilaksanakan seperti yang direncanakan, dan apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani. Evaluasi ini juga menilai mengenai strategi pelaksanaan program; (b) evaluasi manfaat (*outcome evaluation*), yakni meneliti, menilai dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan; dan (c) evaluasi akibat (*impact evaluation*), yakni meneliti dan menilai apakah program telah menghasilkan akibat atau dampak yang membawa perubahan baik atau buruk dari suatu program. Terkait dengan evaluasi keberhasilan transmigrasi Jawa Timur di UPT Tanjung Buka SP.3 Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara ini, dapat digolongkan sebagai evaluasi manfaat yang meneliti, menilai, dan menentukan apakah tingkat keberhasilan yang dicapai sudah sesuai dengan target pelaksanaan program.

Indikator Evaluasi Program Transmigrasi

Menurut Ghazali (dalam [Abao dkk, 2006: 179–189](#)) transmigrasi bukan hanya sekadar perpindahan atau pemindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain di seluruh Indonesia untuk berbagai kepentingan pembangunan daerah, tetapi transmigrasi seharusnya lebih mementingkan keberhasilan masyarakat yang dipindah atau pindah sendiri. Menurut UU Nomor 9 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, tujuan utama program transmigrasi adalah meningkatkan kesejahteraan transmigran. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat memberi pengertian sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan dasar berupa kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, serta terpenuhinya hak asasi dan partisipasi ([Jumari, 2016:972](#)).

Tingkat kesejahteraan (*welfare*) adalah konsep yang digunakan untuk menyatakan kualitas hidup suatu masyarakat atau individu di suatu wilayah pada suatu kurun waktu tertentu. Kesejahteraan itu bersifat luas yang dapat diterapkan pada skala sosial besar dan kecil misalnya keluarga dan individu. Konsep kesejahteraan atau rasa sejahtera yang dimiliki bersifat relatif, tergantung bagaimana penilaian masing-masing individu terhadap kesejahteraan itu sendiri. Sejahtera bagi seseorang dengan tingkat pendapatan tertentu, belum tentu dapat juga dikatakan sejahtera bagi orang lain ([Yosep, 1996:13](#)).

Kesejahteraan mencakup dua pendekatan, yaitu pendekatan makro dan mikro. Pendekatan makro memandang bahwa kesejahteraan dapat dinyatakan dengan indikator-indikator yang telah disepakati secara ilmiah. Sehingga ukuran kesejahteraan masyarakat berdasarkan data-data empiris suatu masyarakat. Pendekatan ini mencakup lingkungan yang sangat luas, yaitu negara atau wilayah provinsi dan lebih dikenal dengan pendekatan makro obyektif. Pendekatan mikro lebih dikenal dengan pendekatan mikro subyektif yang memandang bahwa kesejahteraan itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan psikologi individu secara pribadi untuk melihat apa yang dianggapnya sebagai keadaan sejahtera ([Yosep, 1996:13](#)).



Konsep kesejahteraan identik dengan terpenuhinya kebutuhan individu (yang beragam), dimana makna "terpenuhinya kebutuhan" antara satu individu dengan individu lain berbeda dan bersifat sangat relatif. Oleh sebab itu, untuk mengetahui kesejahteraan individu/keluarga/rumah tangga bukanlah pekerjaan yang mudah, sehingga diperlukan beberapa kriteria dan indikator ([Maharani, 2006:22](#)). Dalam perspektif ini, tingkat pendapatan transmigran yang bertumpu pada hasil usaha tani sulit dinilai secara keseluruhan, terutama hasil tani yang dimakan sendiri (*self-consumption*), seperti sayuran, umbi-umbian, buah-buahan, atau hasil ternak.

Menurut [Badan Pusat Statistik \(2006\)](#) ada 8 (delapan) indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, yaitu: (1) Pendapatan; (2) Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga; (3) Keadaan tempat tinggal; (4) Fasilitas tempat tinggal atau permukiman; (5) Kesehatan anggota keluarga; (6) Kemudahan mendapat pelayanan kesehatan; (7) Kemudahan memasukkan ke jenjang pendidikan; (8) Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program transmigrasi (penempatan transmigran) pertama di Kabupaten Bulungan pada tahun 1973-1976, sebanyak 195 Kepala Keluarga (KK) terdiri dari 908 jiwa. Peserta program transmigrasi di Kabupaten Bulungan berasal dari DKI, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, NTB, NTT, dan Lampung. Peserta program transmigrasi pertama yang berasal dari Jawa Timur saat itu ditempatkan di Desa Gunung Putih, Kecamatan Tanjung Palas. Mulai tahun 1973 hingga 2014 jumlah transmigran yang ditempatkan di Kabupaten Bulungan mencapai 5.638 KK yang terdiri dari 21.088 jiwa, dimana jumlah transmigran terbesar berasal dari Jawa Timur sebanyak 2.338 KK dan 8.605 jiwa, disusul Jawa Tengah sebanyak 1.190 KK dan 4.480 jiwa, dan Jawa Barat sebanyak 1.022 KK dan 3.685 jiwa. Sedangkan dari provinsi lainnya rata-rata kurang dari 400 KK, dimana terendah berasal dari Banten sebanyak 39 KK dan 155 jiwa, Lampung sebanyak 75 KK dan 291 jiwa, dan DKI sebanyak 136 KK dan 525 jiwa.

Sesuai dengan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Bulungan, tanggal 8 Desember 2011, dan telah diperbaharui dengan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan, tanggal 25 November 2014, yang menyepakati akan mengirimkan sebanyak 600 KK dari Jawa Timur secara *multiyears* (tahun 2012 s/d tahun 2016) untuk ditempatkan di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Sehingga sebagai tindak lanjut dari program penempatan 600 KK asal Jawa Timur di Kabupaten Bulungan, maka pada tahun 2015 s/d 2016 telah ditempatkan transmigran asal Jawa Timur di UPT Tanjung Buka SP.3 sebanyak 150 KK dan 530 jiwa.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan transmigrasi Jawa Timur di UPT Tanjung Buka SP.3 melalui 4 (empat) tahap. Pertama, mendeskripsikan karakteristik responden/informan yang dijadikan sampel dalam kajian ini. Kedua, menganalisis keberhasilan program transmigrasi berdasarkan 8 (delapan) indikator yang diukur. Ketiga, menganalisis permasalahan (kendala/hambatan) yang dihadapi transmigran untuk meningkatkan kesejahteraannya. Keempat, menganalisis dan merumuskan upaya-upaya konkrit dan langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi transmigran.



Pendapatan

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan transmigran adalah dengan menganalisis tingkat pendapatan transmigran, yang datanya diperoleh dari transmigran yang menjadi responden dan informan. Dengan pendapatan transmigran yang meningkat maka diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga meningkatkan kesejahteraan transmigran. Analisis tingkat pendapatan rumah tangga transmigran dilakukan dengan menggunakan besarnya pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*) keluarga transmigran selama setahun terakhir dalam satuan kg setara beras, dibandingkan dengan standar yang ditargetkan tercapai pada tahun pembinaan tertentu: T+2; T+3; dan T+4 (Keputusan Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambahan Hutan RI Nomor 06/MEN/1999).

Oleh sebab itu, tingkat pendapatan transmigran (responden) UPT Tanjung Buka SP.3 sebagaimana Tabel 1 berikut tidak dapat dijadikan sebagai indikator utama untuk menilai tingkat kesejahteraan transmigran. Selain sangat dipengaruhi oleh keterbatasan waktu survey dan daya ingat seorang transmigran tentang apa saja yang sudah diperolehnya selama sebulan, hasil produksi usaha tani yang dimakan sendiri (*self-consumption*) seperti beras, jagung, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan dan hasil ternak (termasuk telur) sulit dikonversi dengan nilai uang sebagai bagian yang melekat (*inherent*) dari besarnya pendapatan dalam bentuk uang (rupiah).

Pada umumnya responden tidak memiliki data riil tentang besaran pendapatannya (rupiah), indikator tingkat pendapatan ini dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan persepsi berdasarkan pemahaman serta apa yang dirasakan responden, atau lebih dikenal sebagai analisis statistik deskriptif. Skala yang digunakan untuk menilai indikator tingkat pendapatan adalah: (1) kurang; (2) pas-pasan; dan (3) cukup. Sedangkan untuk menilai indikator lainnya menggunakan skala yang bervariasi sesuai dengan karakteristik masing-masing indikator.

Tabel 1.
Tingkat Pendapatan Transmigran per Bulan

No	Pendapatan (Rp)	Frekuensi	Persentase
1.	< 1.000.000	7	14,00
2.	Rp. 1.000.000 – 2.000.000	24	48,00
3.	> 2.000.000	19	38,00
	Total	50	100,00%

Sumber: data primer diolah (2018)

Pendapatan kepala keluarga transmigran ini diperoleh dari pendapatan pokok dan pendapatan sampingan. Pendapatan pokok diperoleh dari usaha bertani/berkebun dengan komoditi seperti padi, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, umbi-umbian, mangga, jeruk, nangka, pisang, pepaya, jambu, nanas, rambutan, sayuran seperti buncis, kacang panjang, sawi, bayam, kangkung, cabe, tomat, timun dan lain-lain.

Pendapatan sampingan seperti pembuatan tahu, pembuatan snack, tukang jahit, tukang cukur, tukang kayu, tukang batu, reperasi sepeda, warung, reparasi radio/TV, reparasi jam, angkutan, dan tukang pijat. Pekerjaan sampingan sebagai buruh, tukang batu/kayu, umumnya dilakukan di Kecamatan Tanjung Selor yang berjarak sekitar 12 km dan kota Tanjung Selor yang berjarak sekitar 26 km. Lama bekerja sebagai buruh atau tukang tersebut bervariasi antara 1 minggu, 2 minggu atau sebulan. Selama transmigran (KK) yang bersangkutan bekerja sebagai buruh atau tukang batu/kayu di Tanjung Selor dan sekitarnya, pekerjaan usaha bertani/berkebun dikerjakan oleh istri dan anak-anaknya.



Tabel 2.
Persepsi Responden tentang Tingkat Pendapatannya

No	Persepsi Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Kurang	9	18,00
2.	Pas-pasan	18	36,00
3.	Cukup	23	46,00
	Total	50	100,00%

Sumber: data primer diolah (2018)

Lebih lanjut mengenai persepsi (penilaian) responden/transmigran tentang tingkat pendapatannya menunjukkan sebanyak 23 orang atau 46,00% responden menilai pendapatan yang diperolehnya selama sebulan, baik dari hasil pekerjaan utama bertani maupun hasil pekerjaan sampingan sudah cukup. Sebanyak 18 orang atau 36,00% menilai pendapatannya pas-pasan, dan sebanyak 9 orang atau 18,00% yang menilai pendapatannya masih kurang.

Tabel 2 menunjukkan bahwa pendapatan transmigran apabila dinilai dengan nominal uang masih berada di bawah UMK Kabupaten Bulungan yang pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.439.950 (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan, 2018). Meski demikian pendapatan tersebut belum diperhitungkan dengan pengeluaran kebutuhan pangan yang dipenuhi dari hasil produksi usaha tani yang dimakan sendiri (*self-consumption*), sehingga persepsi transmigran terhadap pendapatan yang mereka peroleh sebagaimana informasi tersebut sebagian besar mengaku sudah cukup baik.

Sebagian besar transmigran menilai bahwa taraf hidup mereka meningkat dibanding sebelum melakukan transmigrasi. Meskipun sebagian kecil transmigran ada yang merasa bahwa penghasilan tidak meningkat, akan tetapi mereka lebih menyukai kehidupan yang baru sebagai warga transmigrasi, alasannya karena sekarang mereka memiliki rumah dan lahan untuk keluarga, sekolah untuk anak-anak dan jaminan kesehatan publik untuk keluarga.

Pengeluaran

Konsumsi atau pengeluaran keluarga transmigran terdiri dari pengeluaran pangan dan non-pangan. Pengeluaran untuk pangan antara lain seperti beras, minyak goreng, daging, ikan, dan lain-lain. Sedangkan pengeluaran non-pangan antara lain seperti transportasi (termasuk BBM), biaya jajan anak sekolah, pakaian, pulsa, rokok, dan lain-lain, serta investasi dalam bentuk pembelian barang tahan lama seperti perabotan (kursi, meja, lemari, tempat tidur, dan sebagainya), sepeda motor, ternak, dan lainnya.

Untuk menganalisis tingkat konsumsi atau pengeluaran rumah tangga transmigran digunakan asumsi bahwa semakin tinggi pendapatan maka pengeluaran kebutuhan dasar (dibelanjakan untuk makanan) semakin kecil rendah, dan porsi pengeluaran kebutuhan non-pangan termasuk investasi dalam bentuk pembelian barang tahan lama akan semakin besar. Ini sesuai dengan hukum ekonomi, dimana transmigran sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup, maka pengeluaran lebih digunakan untuk kebutuhan non-pangan, sehingga menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan transmigran yang bersangkutan.

Berdasarkan data pada tabel 3 dibawah ini menunjukkan bahwa semua kebutuhan pangan belum dapat dipenuhi dari hasil produksi usaha tani transmigran, dalam hal ini makanan pokok beras, sehingga mereka masih harus mengeluarkan biaya untuk membeli beras. Menurut hasil wawancara dengan responden/transmigran, pengeluaran terbesar untuk kebutuhan pangan adalah membeli beras. Hal ini disebabkan hasil usaha tani di



lahan usaha I transmigran terutama beras menurut pengakuan responden/transmigran belum mampu mencukupi kebutuhan selama setahun, karena produktivitas sawah ton/hektar masih rendah sekitar 1,5 s/d 2 ton per tahun. Warga transmigran asal Jawa Timur di UPT Tanjung Buka SP.3 hanya mengandalkan lahan pekarangan dan lahan usaha (LU) I untuk memenuhi kebutuhan hidup pangan dan non-pangan sehari-hari. Di sisi lain, sebagian LU I juga belum dapat dimanfaatkan karena proses pembersihan lahan (*land clearing*) yang belum optimal, karena masih adanya sisa-sisa batang pohon yang sulit dibersihkan secara manual. Sementara pertanian lahan gambut dalam skala kecil, tanpa amelioran dan pemupukan yang memadai, hanya akan mampu bertahan beberapa tahun, selama kesuburan asli alami masih ada. Tingkat pemanfaatan teknologi dan sarana produksi seperti alat-alat pertanian (khususnya traktor), sarana produksi (saprodi) seperti pupuk, bibit unggul, obat pembasmi hama, dan lain-lain masih terbatas sehingga mempengaruhi tingkat produktifitasnya.

Tabel 3.
Persepsi Responden tentang Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran	Persepsi Responden					
	Kecil	%	Sedang	%	Besar	%
Pangan	20	40,00	17	34,00	13	26,00
Non-Pangan	10	20,00	10	20,00	30	60,00

Sumber: data primer diolah (2018)

Informasi tersebut di atas menunjukkan bahwa sebagian besar transmigran belum mampu memenuhi kebutuhan pangan yang merupakan kebutuhan dasar, sehingga tidak tersedia cukup uang untuk memenuhi kebutuhan non-pangan. Jika dikaitkan dengan tingkat pendapatan sebagaimana telah dijelaskan di depan, berarti secara riil sebagian besar pendapatan transmigran belum dapat memenuhi kebutuhan pangan dan non-pangan. Dengan demikian, dilihat dari indikator tingkat pendapatan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan transmigran asal Jawa Timur di UPT Tanjung Buka SP.3 belum cukup baik, sehingga belum dapat dikatakan benar-benar sejahtera mengingat ukuran kesejahteraan itu sendiri bersifat relatif.

Kondisi Rumah

Sesuai ketentuan dalam program transmigrasi, setiap KK transmigran memperoleh satu unit rumah tempat tinggal berikut lahan pekarangan yang total luasnya 0,25 ha. Pada tabel 4 dapat dilihat penilaian responden/transmigran terhadap kondisi rumah tinggalnya saat ini. Sebanyak 19 orang atau 38,00% menilai kondisi rumah yang mereka tempati saat ini sudah cukup baik, sedangkan sebanyak 12 orang atau 24,00% menilai kondisinya sedang, dan sebanyak 19 orang atau 38,00% yang menilai kurang baik.

Tabel 4.
Persepsi Responden tentang Kondisi Rumahnya

No	Persepsi Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Kurang Baik	19	38,00
2.	Sedang	12	24,00
3.	Cukup Baik	19	38,00
	Total	50	100,00%

Sumber: data primer diolah (2018)



Penilaian kondisi rumah responden/transmigran pada tabel 4 di atas tidak terlepas dari sarana yang dimiliki rumah tangga, antara lain seperti sarana air bersih yang dapat mereka oleh dari bahan baku yang berasal air Sungai Kayan maupun air hujan, perabotan rumah seperti meja dan kursi, lemari, radio, dan TV. Dengan sarana yang semakin lengkap sesuai dengan kebutuhan transmigran, maka kondisi rumah tinggal menjadi semakin nyaman.

Tabel 5.
Persepsi Responden tentang Sarana Rumah Tinggal

No	Persepsi Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Kurang Memadai	23	46,00
2.	Sedang	0	00,00
3.	Memadai	27	54,00
	Total	50	100,00%

Sumber: data primer diolah (2018)

Dengan semakin memadainya sarana rumah tinggal yang dimiliki, maka penilaian transmigran terhadap kondisi rumahnya akan semakin baik pula, dan sebaliknya. Dari informasi pada tabel 5 dapat dilihat bahwa sebagian besar transmigran menilai rumah tinggal yang ditempatinya saat ini masih kurang baik. Artinya, dilihat dari indikator kondisi rumah, tingkat kesejahteraan transmigran asal Jawa Timur di UPT Tanjung Buka SP.belum cukup baik.

Fasilitas Permukiman

Dalam program transmigrasi selain membangun rumah tinggal untuk setiap KK transmigran, pemerintah juga membangun fasilitas permukiman berupa jalan, jembatan, selokan, maupun fasilitas umum lainnya seperti balai pertemuan, Puskesmas Pembantu (Pustu), sekolah SD, pergudangan, dan lainnya. Adapun persepsi transmigran (responden) tentang fasilitas permukiman yang tersedia dapat disimak pada tabel 6 berikut.

Tabel 6.
Persepsi Responden tentang Fasilitas Permukiman

No	Persepsi Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Kurang Memadai	17	34,00
2.	Sedang	11	22,00
3.	Memadai	21	42,00
	Total	50	100,00%

Sumber: data primer diolah (2018)

Dengan demikian, berdasarkan dapat persepsi transmigran tersebut, dapat kita simpulkan bahwa fasilitas permukiman di UPT Tanjung Buka SP.3 belum cukup memadai, berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara masih terdapat beberapa kekurangan. Beberapa fasilitas permukiman seperti jaringan listrik, dan sarana air bersih masih terbatas. Untuk keperluan air bersih, sebagian besar warga transmigran masih mengandalkan air hujan. Sedangkan sarana penerangan dalam bentuk tenaga surya (solar sel) selain kapasitasnya terbatas biaya pemeliharannya cukup tinggi, sehingga tidak efisien. Berdasarkan hasil observasi di lapangan terlihat kondisi rumah warga transmigran sudah mulai mengalami kerusakan karena terjadinya pembusukan balok-balok dan papan bangunan sehingga perlu segera direhabilitasi. Di samping itu, sarana air bersih masih



terbatas sehingga untuk keperluan air bersih, sebagian besar warga transmigran masih mengandalkan air hujan.

Kesehatan

Derajat kesehatan anggota keluarga responden/transmigran dapat dilihat dari tingkat atau angka kesakitan transmigran, dimana berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas Pembantu (Pustu) UPT Tanjung Buka SP.3 sebagaimana dilaporkan oleh Kepala UPT, selama bulan Januari s/d Maret 2018 anggota keluarga transmigran yang mengalami sakit tercatat sebanyak 29 kasus/orang dengan jenis penyakit dan jumlah penderita sesuai tabel 7.

Jika diperhatikan data jenis penyakit yang diderita anggota keluarga transmigran berdasarkan laporan bulanan dari Puskesmas Pembantu UPT Tanjung Buka SP.3 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 7, pada umumnya jenis penyakit yang diderita transmigran tergolong ringan dan dapat ditangani oleh Puskesmas Pembantu. Secara umum derajat kesehatan transmigran di UPT Tanjung Buka SP.3 dari sisi jumlah transmigran yang menderita sakit serta jenis penyakit yang diderita, secara umum dapat dikatakan derajat kesehatan transmigran di UPT Tanjung Buka SP.3 sudah cukup baik.

Tabel 7.
Jenis dan Jumlah Penderita Bulan Januari s/d Maret 2018

No	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
1.	Malaria	-
2.	Disentri	2
3.	Muntaber	-
4.	Tifus	-
5.	Infeksi Saluran Pernaafasan Atas (ISPA)	2
6.	Sakit Kulit/Gatal-gatal	2
7.	Anemia	1
8.	TBC	-
9.	Tekanan darah tinggi	5
10.	Tekanan darah rendah	8
11.	Maag	7
12.	Mata	2
13.	Syaraf	-
14.	Kecelakaan	-
15.	Liver	-
	Total	29

Sumber: Monografi UPT Tanjung Buka SP.3

Selanjutnya pada tabel 8 berikut dapat dilihat derajat kesehatan transmigran selama kurun waktu sejak penempatan tahun 2015/2016 sampai dengan bulan Agustus 2018 saat evaluasi ini dilakukan, berdasarkan jawaban kuesioner dan pendalaman persepsi responden/transmigran melalui wawancara, dimana sebanyak 29 orang atau 58,00% mengaku seluruh anggota keluarganya selalu dalam keadaan sehat, sebanyak 17 orang atau 34,00% menyatakan kadang-kadang ada anggota keluarganya yang sakit atau anggota keluarganya tergolong jarang sakit, dan sebanyak 4 orang atau 8,00% menyatakan ada anggota keluarganya yang sering sakit.



Tabel 8.
Persepsi Responden tentang Kesehatan keluarganya

No	Persepsi Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Selalu Sehat	29	58,00
2.	Kadang-kadang Ada Anggota Keluarga yang Sakit atau Anggota Keluarga jarang Sakit	17	34,00
3.	Anggota Keluarga ada yang sering Sakit	4	8,00
	Total	50	100,00%

Sumber: data primer diolah (2018)

Data ini didukung oleh jenis dan jumlah warga masyarakat yang menderita sakit dan berobat ke Pustu UPT Tanjung Buka SP.3 selama kurun waktu bulan Januari s/d Maret 2018 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 8 di atas. Artinya, jika dilihat dari indikator kesehatan anggota keluarga transmigran, tingkat kesejahteraan transmigran di UPT Tanjung Buka SP.3 sudah cukup baik.

Kemudahan Pelayanan Kesehatan

Di UPT Tanjung Buka SP.3 terdapat fasilitas pelayanan kesehatan berupa Puskesmas Pembantu (Pustu) yang dilayani oleh paramedis dan bidan, sedangkan untuk kunjungan tenaga dokter dilakukan secara periodik. Tenaga dokter umum berdomisili di Puskesmas Kecamatan Tanjung Palas yang berjarak 12 km dari UPT Tanjung Buka SP.3. Selain itu, di UPT Tanjung Buka SP.3 terdapat 1 (satu) orang tenaga dukun bayi. Puskesmas Pembantu yang ada di SP.3 sangat mudah dicapai oleh para transmigran karena jaraknya tidak jauh dari permukiman transmigran.

Tabel 9.
Persepsi tentang Kemudahan Pelayanan Kesehatan

No	Persepsi Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Sulit	11	22,00
2.	Sedang	17	34,00
3.	Mudah	22	44,00
	Total	50	100,00%

Sumber: data primer diolah (2018)

Berdasarkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah sebagaimana telah diuraikan di depan, persepsi responden/transmigran di UPT Tanjung Buka SP.3 tentang kemudahan mendapat pelayanan kesehatan dapat disimak pada data tabel 9 dimana sebanyak 22 orang atau 44,00% menilai mudah, sebanyak 17 orang atau 34,00% menilai sedang, sedangkan selebihnya sebanyak 11 orang atau 22,00% menilai sulit. Data ini menguatkan pendapat bahwa dilihat dari indikator kesehatan, tingkat kesejahteraan transmigran sudah cukup baik.

Pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu UPT Tanjung Buka SP.3 dibuka setiap hari mulai hari Senin s/d Sabtu, dan dilayani oleh 1 (satu) orang tenaga bidan dan 1 (satu) orang tenaga perawat. Sedangkan pelayanan oleh dokter yang berdomisili di Puskesmas Tanjung Palas Tengah sekali dalam sebulan. Selain dilengkapi dengan peralatan medis dan non-medis sesuai dengan standar, juga tersedia obat-obatan sesuai dengan standar yang ditentukan untuk Puskesmas Pembantu (Pustu). Di samping itu juga terdapat pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang melayani 170 PUS (Pasangan Usia Subur) berikut dengan alat kontrasepsi. Semua pelayanan kesehatan tersebut ditanggung



oleh pemerintah, sehingga untuk berobat transmigran tidak dikenakan biaya apa pun (gratis). Khusus untuk kesehatan ibu hamil dan balita, tersedia Posyandu dengan frekuensi sebulan sekali terdiri dari pelayanan imunisasi, pemberian makanan bergizi, pemberian vitamin, penimbangan bayi, dan pemeriksaan ibu hamil.

Yang perlu menjadi catatan adalah pelayanan medis oleh tenaga dokter dengan sistem rujukan sebulan sekali masih dirasakan sangat kurang. Selain itu, frekuensi pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita masih terbatas sebulan sekali, padahal idealnya seminggu sekali. Sedangkan untuk layanan pendidikan dasar sudah cukup memadai pada tingkat PAUD/TK dan SD, namun untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti SLTP dan SLTA/SMK belum tersedia, sehingga untuk menyekolahkan anak pada tingkat tersebut harus ke Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas, dan Kota Tanjung Selor yang biaya transportasinya masih relatif mahal bagi warga transmigran.

Kemudahan Pendidikan

Pendidikan sangat berperan sebagai faktor kunci untuk dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, meski investasi di bidang pendidikan memiliki jangka waktu panjang untuk merasakan atau melihat manfaat dan dampaknya. Dalam konteks transmigrasi, yang menjadi fokus evaluasi indikator pendidikan adalah anak-anak transmigran. Artinya, semakin tinggi tingkat kesejahteraan transmigran maka akan semakin mudah memasukkan anak-anaknya ke semua jenjang pendidikan.

Mengingat sebagian besar transmigran asal Jawa Timur di UPT Tanjung Buka SP.3 merupakan keluarga muda, maka jenjang pendidikan dasar yang paling dibutuhkan adalah pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Oleh sebab itu, fokus evaluasi ini dititikberatkan pada kemudahan memasuki jenjang pendidikan tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK dan tingkat SD. Namun demikian, kepada responden juga ditanyakan dan digali informasi melalui wawancara untuk memasuki jenjang pendidikan di atasnya, yaitu tingkat SLTP maupun SLTA/SMK. Pada tabel 10 dapat dilihat persepsi responden tentang kemudahan memasuki jenjang pendidikan dimaksud.

Tabel 10.

Persepsi tentang Kemudahan Layanan Pendidikan

No	Persepsi Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Sulit	15	30,00
2.	Sedang	14	28,00
3.	Mudah	21	42,00
	Total	50	100,00%

Sumber: data primer diolah (2018)

Berdasarkan data pada tabel 10 diketahui persepsi responden/transmigran dimana sebanyak 21 orang atau 42,00% menilai mudah, sebanyak 14 orang atau 28,00% menilai sedang, dan selebihnya sebanyak 15 orang atau 30,00% menilai sulit. Secara umum dari komposisi persepsi tersebut, dapat dikatakan bahwa dari indikator kemudahan fasilitas pendidikan transmigran asal Jawa Timur di UPT Tanjung Buka SP.3 sudah cukup baik. Hal ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan PAUD/TK Tunas Kaltara yang berstatus swadaya, serta SD Negeri 019 Tanjung Palas di UPT Tanjung Buka SP.3 yang bagi anak didiknya tidak dibebankan biaya (gratis). Sebagian responden yang berpersepsi sedang sampai sulit (58,00%), ketika dilakukan wawancara secara mendalam, ternyata mereka memiliki anak pada jenjang SLTP dan SLTA/SMK. Fasilitas pendidikan pada jenjang ini belum tersedia, sehingga untuk menyekolahkan anak pada tingkat tersebut harus ke



Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas, dan Kota Tanjung Selor yang biaya transportasinya masih relatif mahal bagi warga transmigran.

Fasilitas Transportasi

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah, khususnya daerah perdesaan dan daerah terpencil. Transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Transportasi juga untuk membuka peluang kegiatan perdagangan antar wilayah dan mengurangi perbedaan antar wilayah, sehingga mendorong terjadinya pembangunan antar wilayah.

Secara khusus bagi transmigran di UPT Tanjung Buka SP.3 sebagai wilayah permukiman yang relatif baru dibuka, kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi atau tingkat aksesibilitas UPT Tanjung Buka SP.3 terutama ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan-jembatan penghubung menjadi sangat penting, karena menyediakan akses bagi warga transmigran khususnya dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa sehari-hari, serta meningkatkan kehidupan sosial ekonomi. Untuk memperoleh kebutuhan barang dan jasa, bekerja sampingan, memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan serta layanan sosial ekonomi lainnya, Kota Tanjung Selor yang berjarak sekitar 20 km dapat ditempuh melalui sungai sekitar 20 s/d 30 menit. Hal tersebut disebabkan belum dibangunnya jembatan penghubung dari UPT Tanjung Buka SP.3 menuju Kecamatan Tanjung Palas. Sebab merupakan akses satu-satunya dimana terdapat jalur penyeberangan Sungai Kayan langsung menuju Kota Tanjung Selor, kondisi ini menyebabkan waktu tempuh ke Kota Tanjung Selor menjadi sekitar 45 menit sehingga menyebabkan biaya transportasi menjadi relatif tinggi. Padahal dengan tersedianya jembatan penghubung dimaksud, waktu tempuh dari UPT Tanjung Buka SP.3 ke Kota Tanjung Selor hanya sekitar 10 s/d 15 menit.

Kondisi seperti itu, menyebabkan penilaian warga transmigran UPT Tanjung Buka SP.3 tentang kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi atau tingkat aksesibilitas dapat dilihat dari persepsi responden yang diperoleh dari jawaban kuesioner masih kurang memadai. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel 11 dimana persepsi responden/transmigran yang diwawancarai sebanyak 15 orang atau 30,00% menilai sulit, sebanyak 12 orang atau 24,00% menilai sedang, dan sebanyak 23 orang atau 46,00% menilai mudah. Jika dilihat komposisi persepsi responden/transmigran di atas, maka secara umum dapat dikatakan tingkat kesejahteraan transmigran di UPT Tanjung Buka SP.3 dari indikator kemudahan fasilitas transportasi cukup baik.

Tabel 11.

Persepsi tentang Kemudahan Fasilitas Transportasi			
No	Persepsi Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Sulit	15	30,00
2.	Sedang	12	24,00
3.	Mudah	23	46,00
	Total	50	100,00%

Sumber: data primer diolah (2018)

Ketersediaan prasarana infrastruktur jalan baik itu berupa jalan penghubung ke lokasi/desa lainnya yang berbatasan di lokasi UPT Tanjung Buka SP.3, maupun jembatan penghubung untuk dapat sampai ke tempat penyeberangan langsung ke Kota Tanjung



Selor di Sungai Kayan, merupakan kebutuhan penting bagi warga transmigran di UPT Tanjung Buka SP.3. Infrastruktur tersebut dapat memperlancar arus orang, barang, dan jasa langsung ke Kota Tanjung Selor yang berjarak hanya sekitar 20 km yang selama ini jarak tempuhnya masih sekitar 45 menit dengan menggunakan angkutan sungai (perahu *ketingting*).

Jika jembatan utama menuju lokasi penyeberangan Sungai Kayan langsung ke Kota Tanjung Selor dapat direalisasikan, serta infrastruktur jalan desa juga dapat diperbaiki melalui semenisasi, maka dari lokasi UPT Tanjung Buka SP.3 menuju Kota Tanjung Selor dapat ditempuh dalam waktu 15 s/d 20 menit. Selain dapat mempercepat waktu tempuh, yang terpenting dan terutama bagi warga transmigran adalah dapat menghemat biaya transportasi dari yang sekarang sekitar Rp. 30 ribu menjadi sekitar Rp. 10 s/d 15 ribu.

E. PENUTUP

Meski secara umum atau rata-rata berdasarkan pengukuran 8 (delapan) indikator tingkat kesejahteraan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan transmigran UPT Tanjung Buka SP.3 dapat dikategorikan cukup baik, namun berdasarkan analisis cermat terhadap jawaban kuesioner responden/transmigran, pendalaman melalui wawancara mendalam, serta observasi di lapangan, masih terdapat beberapa permasalahan yang cukup krusial berupa kendala dan hambatan yang meliputi aspek kondisi lahan, aspek teknis pengelolaan usaha tani, infrastruktur jalan dan jembatan, ekonomi, dan sosial.

Kondisi lahan sebagian LU I apalagi LU II belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, sedangkan proses ameliorasi untuk meminimalisir tingkat keasaman lahan yang tinggi belum dapat dilakukan secara optimal karena keterbatasan biaya pengadaan kapur dalam jumlah cukup besar. Produktivitas lahan usaha tani warga transmigran saat ini juga masih relatif rendah karena pemanfaatan teknologi dan sarana produksi seperti alat-alat pertanian, sarana produksi seperti pupuk, bibit unggul, obat pembasmi hama, dan lain-lain masih terbatas. Tingkat aksesibilitas UPT Tanjung Buka SP.3 masih sangat rendah yang disebabkan ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan-jembatan penghubung yang masih kurang memadai, sehingga menyebabkan waktu tempuh ke kota Tanjung Selor cukup lama dengan biaya transportasi yang relatif tinggi.

Beberapa fasilitas permukiman seperti jaringan listrik, dan sarana air bersih masih terbatas, untuk keperluan air bersih sebagian besar warga transmigran di UPT Tanjung Buka SP.3 masih mengandalkan air hujan, sedangkan sarana penerangan dalam bentuk tenaga surya atau solar sel selain kapasitasnya terbatas biaya pemeliharannya cukup tinggi, sehingga tidak efisien. Terkait aspek pelayanan kesehatan di UPT Tanjung Buka SP.3 hasil evaluasi menunjukkan sudah cukup baik dengan adanya Puskesmas Pembantu (Pustu), namun pelayanan medis yang dilakukan oleh tenaga dokter dengan sistem rujukan sebulan sekali masih dirasakan sangat kurang. Selain itu, frekuensi pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita masih terbatas sebulan sekali, padahal idealnya dilakukan seminggu sekali. Untuk layanan pendidikan dasar sudah cukup memadai terutama pada tingkat PAUD/TK dan SD, namun untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti SLTP dan SLTA/SMK belum tersedia.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan di atas terutama yang dihadapi warga transmigran UPT Tanjung Buka SP.3, dapat dirumuskan upaya-upaya dan atau langkah-langkah antisipatif sebagai berikut: *Pertama*, pembersihan (*land clearing*) lahan usaha (LU) I warga transmigran perlu dipercepat melalui intervensi Dinas PU Kabupaten Bulungan, sehingga ketika masa pembinaan 5 (lima) tahun berakhir



masalah pembersihan lahan sudah dapat diselesaikan dan tidak menjadi beban warga transmigran.

Kedua, mempercepat pembuatan tanggul anak Sungai Kayan sepanjang 6 km yang bersebelahan dengan LU II warga transmigran, serta pembersihan lahan LU II pembangunan drainase serta tanggul-tanggul kanalisasi berikut pintu-pintunya sesuai persyaratan teknis.

Ketiga, diperlukan intervensi Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan guna membantu teknologi alat-alat pertanian khususnya traktor serta sarana produksi (saprodi) seperti pupuk, bibit unggul, obat pembasmi hama, dan lain-lain melalui skema pinjaman atau kredit lunak serta mempercepat proses ameliorasi secara menyeluruh terhadap LU I milik warga transmigran.

Keempat, peningkatan aksesibilitas di UPT Tanjung Buka SP.3 dalam bentuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan-jembatan penghubung serta pembangunan jembatan penghubung menuju Kecamatan Tanjung Palas sebagai pintu gerbang penyeberangan menuju Kota Tanjung Selor.

Kelima, perlu dilakukan rehabilitasi dengan skema bantuan bahan-bahan bangunan khususnya kayu dan papan. Sedangkan untuk jaringan listrik perlu dikoordinasikan dengan PLN, sedangkan untuk penyediaan air bersih perlu diintrodusir teknologi tepat guna membangun instalasi penjernihan air rawa atau sungai sebagai alternatif atau pelengkap air tadah hujan; hal ini menjadi sangat efektif ketika masyarakat juga diberdayakan melalui berbagai ketrampilan dan didorong untuk berinovasi, sehingga tidak selalu tergantung dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini sangat diperlukan peningkatan baik dalam segi jumlah maupun kapasitas SDM, dan peran para pendamping yang ada perlu ditingkatkan lagi.

Keenam, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan seperti penambahan frekuensi rujukan tenaga medis dokter menjadi sekali seminggu melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan. Termasuk peningkatan frekuensi pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita menjadi seminggu sekali.

Ketujuh, untuk persiapan ketersediaan SLTP dan SLTA yang terjangkau baik dari sisi jarak tempuh maupun biaya transportasinya, perlu dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan untuk penyediaan fasilitas pendidikan dimaksud yang mengakomodir beberapa UPT Tanjung Buka yang berdekatan, termasuk alternatif kelas jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi (IT).

Kedelapan, pemerintah perlu mendorong masuknya dunia usaha untuk berinvestasi dan bermitra dalam pembangunan kawasan transmigrasi yang lebih komprehensif terutama sekali pengembangan wilayah yang berbasis spesial atau produk unggulan pertanian yang menjadi andalan wilayah Tanjung Buka.

Saat ini peran pemerintah yang besar menjadi kurang efektif, baik sebagai penyandang dana, perumus kebijakan, penyiapan lahan dan kontrol sekaligus pelaksanaannya. Pendanaan sebagian besar masih dibiayai oleh pemerintah yaitu dari daerah penerima, daerah pengirim dan dari pusat dengan mekanisme dekonsentrasi dengan nilai yang masih sangat kecil dengan kebutuhan riil yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan ini.

DAFTAR PUSTAKA

[Abao Nining Sofiati, dan Rita Dewi Trisianti, A. S. \(2006\). Perkembangan Kesejahteraan Rumah Tangga Transmigran Daerah Pantai Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Populasi, 17\(2\), 179–189.](#)



- Arikunto, S. (2009). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- BPS. (2006). *Pendataan Sosial Ekonomi Tahun 2005*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bungin, B. (2003). *Analisis data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J.W., W.E. Hanson., V. C., & Morales, dan A. (2007). "Qualitative Research Designs: Selection and Implementation. *The Counseling Psychologist*, 35(2), 236–264.
- Delam, J. (2011). Kajian Regulasi Penyediaan Tanah untuk Permukiman Transmigrasi. *Jurnal Ketransmigrasian*, 28(2), 55–65.
- Heeren, H. J. (1979). *Transmigrasi di Indonesia: Hubungan Transmigrasi dan Penduduk Asli, dengan Titik Berat Sumatera Selatan dan Tengah*. Jakarta: Gramedia.
- Jumari. (2016). Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Sosial Ekonomi Kelompok Transmigrasi Dalam Perspektif Etnisitas (Studi di Desa Bumi Sejahtera dan Desa Citra Manunggal Jaya Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur). *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(3), 971–980.
- Junaidi, D. (2012). Pengembangan Penyelenggaraan Transmigrasi Di Era Otonomi Daerah: Kajian Khusus Interaksi Permukiman Transmigrasi dengan Desa Sekitarnya. *Jurnal Visi Publik*, 9(1), 522–534.
- Keban, Y. T. (2007). Kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi: Isu Strategis, Bentuk dan Prinsip. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*.
- Keyfitz, N. dan W. N. (1955). *Soal Penduduk dan Pembangunan*. Jakarta: Pembangunan.
- Maharani, T. (2006). *Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Transmigran di Unit Permukiman Transmigrasi Provinsi Lampung*. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Najiyati S, E. H. (2006). *Studi Kontribusi Transmigrasi Terhadap Ketahanan Pangan*. Jakarta: Puslitbang Ketransmigrasian Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Oktavia Nuhfil Hanani, S. (2016). Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur (Pendekatan Input-Output). *Jurnal HABITAT*, 27(2), 72–84.
- Prayogo, S. A. W. (2003). *Ayo ke Tanah Sabrang Transmigrasi di Indonesia (terjemahan dari buku Patrice Leyang: "La terre d'en face-La Transmigran en Indonesie")*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Prihatin, R. B. (2012). Revitalisasi Program Transmigrasi. *Jurnal Aspirasi*, 4(1), 57–64.
- Rustiadi, dan J. (2011). Transmigrasi dan Pengembangan Wilayah. *Makalah Disampaikan Dalam Rangka Penyempurnaan Konsep Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, 14 Februari 2011*. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
- Sofyan, A. F. (2013). Pengaruh Transmigrasi Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 1167–1180.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Swasono, S. E. dan M. S. (1986). *Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Widaryanto, N. I. (2011). Tingkat Kemandirian Transmigrasi Peserta Prima-Trans. *Jurnal Ketransmigrasian*, 28(1), 45–55.
- Wirawan. (2011). *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yosep, S. (1996). *Pengaruh program transmigrasi dan PIR terhadap struktur keluarga*



- dan tingkat kesejahteraan masyarakat tradisional Irian Jaya. Institut Pertanian Bogor.*
- Yudohusodo, S. (1998). Transmigrasi: Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen dengan Persebaran yang Timpang. Jakarta: Jurnalindo Aksara Grafika.*
- Yuminarti, U. (2017). Kebijakan Transmigrasi Dalam Kerangka Otonomi Khusus di Papua: Masalah dan Harapan. Jurnal Kependudukan Indonesia, 12(1), 13–24.*

